

# INFILTRASI GERAKAN HIZBUT TAHRIR: Studi Terhadap Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta

Zulfadli

(Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, E-mail: zulfadli.pdl@yahoo.com)

## Abstract

*The paper examines the infiltration of Hizbut Tahrir Indonesia's movement. In the fact, HTI is one of movements which is regularly to establish the shariah as legal system of Indonesia. In addition, HTI has also been known as radical organization to establish it. In this context, the research concerns in understanding that pattern. With qualitative method—descriptive analysis—the research can be expected to gather the data comprehensively. On other hands, the study is located in D.I. Yogyakarta with some argumentations. Yogyakarta is a famous city which have number of huge students and HTI establish there massively. Essentially, the research shown that HTI can be analyzed through some social theories like social movement, arena and symbolic power theories. It can be understood that HTI uses the politics opportunity—reformation moment—to finish the underground of movement; Next, mobilizing structure—internatal and external mobilization. Finally, managing the movement process—against the westernization.*

**Key Words:** *infiltration, social movement and politics opportunity.*

## PENDAHULUAN

Dinamika gerakan politik organisasi Islam di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Dikatakan menarik, lantaran salah satu agenda yang mereka perjuangkan menjadikan Islam sebagai basis idiologi utama dalam menyebarkan gagasannya. Sehingga dalam menyebarkan gagasannya menimbulkan pertentangan antara agama di satu sisi dengan negara pada sisi lain. Di Indonesia muncul persoalan bagaimana menata hubungan antara agama dan politik, terutama yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Masalah ini muncul karena sempat menguat anggapan sebagian anggota masyarakat bahwa, kelompok Islam tetap menyimpan niat terselubung untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi Islam.

Dalam pada itu, hubungan antara negara dan agama dalam sejarah Indonesia ditandai dengan sikap bersaing dan saling curiga antara dua institusi tersebut. Bahkan gerakan Islam politik dicurigai dan dianggap sebagai pesaing kekuasaan

yang dapat mengusik sosial politik negara. Secara historis anggapan ini dapat dimengerti betapa tajamnya perbedaan yang pernah muncul antara kubu pendukung “Islam Politik” dengan kubu “nasionalis sekuler” (Karim, 1999).

Wacana tentang makna, penafsiran dan fungsi pancasila telah menjadi perdebatan dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Beberapa bulan menjelang kemerdekaan terjadi perdebatan yang sangat serius dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengenai dasar dan falsafah negara. Di satu pihak, kelompok nasionalis Islam menginginkan Islam menjadi dasar negara, dengan implikasi pemberlakuan syariat Islam. Sedangkan di pihak lain, kelompok nasionalis sekuler mengusulkan agar negara berdasarkan faham kebangsaan tanpa dikaitkan dengan ideologi keagamaan, dengan kata lain bukan negara Islam (Ramage, 2002).

Pancasila sebagai asas dan ideologi negara merupakan puncak dari pertentangan dan

sekaligus menunjukkan kekalahan kelompok Islam yang harus berkompromi dengan kepentingan lain. Ini merupakan kekecewaan Islam politik yang pertama dalam perjuangan politiknya. Umat Islam yang sebelumnya memperjuangkan ideologi Islam sebagai dasar negara dalam mukadimah UUD 1945 harus mengalah dengan Pancasila (Assyaukanie, 2011).

Dalam perkembangan selanjutnya isu tentang negara Islam dan penerapan syariat Islam hampir tidak pernah muncul dalam konstelasi politik tanah air, kecuali sesaat di awal pemerintahan Soeharto pada akhir tahun 1960-an. Melalui tampilnya pemerintah Orde Baru menggantikan Orde Lama, sejumlah pemuka organisasi Islam menaruh harapan besar untuk mengakomodasi, memfasilitasi aspirasi dan kepentingan umat Islam (Ma'arif, 1996).

Pada tahun itu juga muncul beberapa organisasi Islam di era 1960-an bermula dari kelompok dakwah masjid di kampus-kampus sekuler muncul untuk merespon fenomena "Islamic turn" yang ditandai dengan besarnya permintaan akan dosen agama di kampus-kampus sekuler. Muara dari kemunculan organisasi Islam ini kemudian melahirkan Latihan Mujahid Dakwah (LMD) yang menekankan pada materi dasar tentang ketauhidan dan ancaman perang pemikiran atau *ghazwul fikr* (Latif, 2005).

Namun, saat konsolidasi organisasi Islam dimulai, penguasa Orde Baru melakukan politik represif yang melemahkan kekuatan organisasi Islam ideologis. Politik represif terus berlanjut tidak hanya memasung gerak organisasi Islam tapi juga parpol-parpol Islam yang telah lebih dulu dilumpuhkan. Untuk mengokohkan kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mengendalikan partai-partai politik dengan melakukan restrukturisasi sistem kepartaian yang

hanya memperbolehkan tiga partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketiga partai tersebut masing-masing mewakili kubu Islam, pemerintah dan nasionalis. Pada tahun 1980 Soeharto memaksakan asas tunggal Pancasila kepada semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan partai politik dan organisasi massa termasuk Islam harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Hal ini, dilakukan pemerintahan Orde Baru, agar Pancasila tidak disalahgunakan dan dirongrong oleh berbagai kekuatan, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Berbagai kebijakan Orba yang sangat otoriter tersebut mengakibatkan kelompok-kelompok Islam menyurutkan langkahnya dan bahkan menyimpan rapat-rapat niat dan semangat menegakkan syariat Islam. Kebijakan ini sekali lagi mengkebiri hak-hak politik parpol dan organisasi Islam ideologis yang membuat gerak perjuangannya kian terpasung (Anwar, 1995).

Seiring pemberlakuan asas tunggal, pada dekade 1980-an juga mulai tumbuh dan berkembang beberapa organisasi radikal internasional seperti Hizbut Tahrir (HT) yang menyebarkan gagasan khilafahnya ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) termasuk di Yogyakarta. Pada 1992 HT mulai memperluas jaringannya di Yogyakarta melalui organisasi mahasiswa bernama Santer (santri terbang). Santer adalah suatu wadah bagi mahasiswa untuk belajar dan memperdalam Islam di kampus-kampus sekuler seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang sebelumnya bernama IKIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" (UPN) Yogyakarta, dan sebagainya (Amal & Panggabean, 2004).

Ketika struktur represif Orde Baru mulai berubah pada akhir tahun 1990-an, organisasi Islam ideologis menemukan peluang politik untuk merapatkan kembali barisannya. Melalui LDK mereka menerjemahkan gerakan kesatuan kelompok aksi politik. Pasca kejatuhan penguasa Orde Baru 21 Mei 1998, ragam organisasi Islam ideologis kian menunjukkan eksistensinya. Di era reformasi, yang ditandai dengan euphoria politik dan terbukanya kran-kran kebebasan berekspresi dimanfaatkan benar-benar oleh berbagai gerakan Islam yang menuntut diberlakukannya syariat Islam. Meskipun perjuangan sebagian partai politik Islam yang ada di legislatif untuk menegakkan syariat Islam tidak terdengar lagi, namun berbagai gerakan sosial keagamaan yang ada di luar sistem pemerintahan masih tetap eksis menuntut ditegakkannya syariat Islam di tanah air. Namun aktor gerakan yang muncul pada masa ini berbeda dengan aktor gerakan Islam yang lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya.

Gerakan mereka berada di luar kerangka *mainstream* proses politik, maupun wacana dalam gerakan Islam dominan. Kelompok-kelompok HTI, MMI, FPI, Lasykar Jihad dan Salafi merupakan representasi generasi baru gerakan Islam di Indonesia. Organisasi-organisasi baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, skripturalis, konservatif dan eksklusif (Arafah, 2004). HTI adalah yang paling solid dan memiliki jaringan paling luas (internasional) di antara gerakan-gerakan baru yang getol berjuang menegakkan syariat Islam tersebut. Bahkan HTI juga yang paling radikal karena HTI tidak hanya bercita-cita menegakkan syariat Islam tapi

juga mendirikan khilafah Islam. Menurut HTI penegakkan syariat Islam secara kaffah mustahil akan terwujud jika tidak ada dalam bingkai Khilafah Islam.

Euforia reformasi semakin dimanfaatkan HTI menyelenggarakan konferensi internasional khilafah Islam di Istora senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh HT internasional maupun nasional serta tokoh-tokoh Islam dari organisasi lain, HT resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka seperti bisa dilihat dari munculnya organisasi ini dalam konteks Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sejak kemunculannya secara resmi ke publik, HTI telah menjadi kekuatan baru kelompok Islam yang menyuarakan ketidakadilan, menolak dominasi negara Barat atas negara muuslim, pemberlakuan syariat Islam dan penegakan khilafah Islamiyah (Afadlal, 2005).

Dalam melaksanakan ide-ide dan gagasannya, HTI menggunakan strategi dalam melakukan gerakan dalam perebutan kekuasaan. Secara perlahan HTI berusaha menguasai arena-arena strategis dan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. HTI mereka berusaha melakukan infiltrasi ke tengah-tengah masyarakat dengan cara menguasai arena-arena strategis dengan cara menguasai sumber daya strategis. Di antara sumber daya tersebut adalah: Penguasaan terhadap mesjid, majelis taklim, penyediaan khatib siap pakai, guru ngaji, penguasaan lembaga-lembaga pendidikan terpadu, penguasaan kampus, instansi pemerintah dan swasta dan lain-lain. HTI secara perlahan berusaha untuk menguasai arena-arena tersebut karena dianggap mumpuni dalam mewujudkan cita-cita khilafah Islamiyah yang mereka perjuangkan (Nashir, 2007).

## ARENA PERJUANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) INDONESIA

Berbicara tentang kekuasaan, HTI telah menegaskan bahwa segala aktivitas dakwah yang dilakukannya selalu berorientasi politik dan kekuasaan. Oleh karena itu berbicara tentang strategi perjuangan HTI ak terlepas dari strategi konsep dakwah yang mereka kembangkan, yaitu *fiqrah*, *thariqah*, dan *uslub*.

*Fiqrah* adalah konsep atau pemikiran, ide-ide, gagasan yang mendasari politik HT, sementara *thariqah* merupakan metode implementasi untuk *fiqrah* (Nabhani, 2007).

Kedua, tujuan dakwah. Dakwah *inqilabi* bertujuan untuk mengubah individu dan sistem, dari sistem jahiliah ke sistem Islam. Perubahan sistem diawali dari individu Muslim dan non-Muslim—telah mengalami *taghyir* tentunya—yang mulai mengubah pola relasinya dengan pola-pola relasi Islam. Jadi pola relasi yang dibangun adalah relasi yang menjadikan syariat Islam sebagai fondasi filosofisnya. Pada akhirnya, seruan penegakan syariat Islam itu sebenarnya mengarah kepada *taghyir* untuk sistem.

Ketiga, marhalah dakwah atau tahapan melakukan dakwah. Ada tiga tahapan untuk melakukan dakwah menurut kajian HT dalam buku *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*: pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan (*at-tatsqif wa at-taqwim*). Kaderisasi HTI berawal dari jaringan yang terbentuk lewat *halaqah* atau kelompok kajian kecil di beberapa kampus semacam IPB, ITB, UI, dan UGM yang akhirnya membentuk LDK. Masa kaderisasi ini berlangsung secara sembunyi-sembunyi (*sirriyah*) lantaran represifitas politik rezim Orde Baru.

Kedua, tahap interaksi dengan masyarakat (*tafaulu ma' al-ummah*). Tahap ini berjalan

setelah para kader membentuk jamaah yang solid nan militan dan berlangsung secara terbuka (*jahriyyah*). Artinya, dakwah dilakukan secara terbuka dari sisi ide dan pergerakannya (*tasqif*). Era reformasi saat ini dianggap telah memasuki tahap interaksi dengan umat.

Ketiga, tahap penyerahterimaan kekuasaan (*istilamu al-hukmi*). Tahap ini ditandai dengan *tathbiqu as-syariah*, pelaksanaan syariah, di setiap lini kehidupan termasuk lembaga negara dan pemerintahan. HT sekarang sedang bergerak menuju tahap penyerahan kekuasaan dari umat Islam ke Khalifah yang dibaiat umat khususnya HT. Keempat, amal dakwah. Amal dakwah terdiri dari pembinaan kualitas ibadah para kader melalui halaqah, membongkar rencana negara-negara kafir (*kasyfu al-futath al-kuffar*), membela kepentingan kaum tertindas (*tabanni mashalibi al-ummah*), berhadapan langsung dengan penguasa yang kafir (*al-muhasabah ma' al-kuffar*), dan menyampaikan ide-ide Islam yang bertolak belakang dengan ide-ide yang telah ada sebelumnya (*as-syira' al-fiqri*) semisal sekularisme dan demokrasi. Selain metode dakwah, HT juga mempunyai sarana dakwah lain dalam menyokong perjuangan mendirikan Khilafah Islamiyah yang disebut *uslub*. *Uslub* adalah teknis dan sarana yang dipakai dalam melakukan *thariqah*. Berbeda dengan *thariqah* yang baku (wajib), *uslub* lebih bersifat elastis (mubah). Maksudnya, ia boleh berbeda dan berubah-ubah, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi arena dakwah. *Uslub* bisa berupa sarana tulisan lewat mediumnya buletin Al-Islam, buku dan majalah, seminar, diskusi, media cetak dan elektronik seperti TV dan radio, situs internet, dan beragam sarana lainnya.

*Uslub* dalam pembahasan ini dimaknai sebagai taktik dari strategi yang diterapkan untuk mempermudah, memfokuskan, dan mentargetkan tercapainya tujuan dan cita-cita

dakwah politik HTI di masyarakat baik di level atas maupun *grassroot*. Sebagai taktik, *uslub* tentunya tidak berdiri sendiri, ia harus berelasi dengan arena-arena. Sebab, penguasaan taktik tanpa target arena yang jelas, atau sebaliknya arena yang telah tersegmentasi tanpa digerakkan oleh taktik yang jitu, semua pasti berjalan sporadis. Jadi, antara *uslub* dan arena perjuangan bagaikan dua sisi koin yang tak dapat terpisahkan.

Secara sosiologis terdapat beberapa arena perjuangan HTI dalam praksisme organisasinya, yakni arena berbasis institusi, komunitas, dan lembaga. Ketiga basis arena tersebut tersebar dalam level-level atau kelas sosial masing-masing. Spesifikasi arena-arena tersebut adalah sebagai berikut:

## **Arena Berbasis Institusi**

### **Masjid**

Masjid dalam pandangan HTI sebagaimana diungkapkan oleh Ismail Yusanto, Juru Bicara DPP HTI, adalah sebagai tempat ibadah umat Islam di mana pun berada baik di kota, kabupaten, kecamatan, desa bahkan pelosok pinggiran sekali pun. Sebagai tempat ibadah masjid merupakan arena yang sangat strategis lantaran menjadi tempat berkumpul kaum Muslim dari ragam kelas sosial, jenis kelamin, dan strata sosial lainnya. Makna strategis masjid dengan alasan masjid itu sebagai tempat ibadah, tempat orang berkumpul, dan di situ dengan mudah kita menyelenggarakan acara-acara dan pembinaan umat.

Secara faktual, guna mendukung taktik mempermudah dan mempercepat jalannya dakwah politik di masjid, HTI mengklasifikasi masjid menjadi dua, yakni masjid kampus dan non-kampus.

Masjid kampus adalah masjid yang menjadi tempat atau arena perjuangan HTI melalui ide-ide, pemikiran, gagasan, dan nilai-nilai atau padangan

ideologis yang diperuntukkan bagi kalangan kaum intelektual (*educated*). Sebaliknya masjid non-kampus adalah masjid yang letaknya tidak atau jauh dari kampus ditujukan kepada masyarakat umum yang notabenehnya masyarakat *non-educated*.

Pertama, masjid berbasis kampus. Masjid kampus sebagai arena perjuangan HTI mayoritas tersebar di kampus-kampus umum dan Islam.

### **Sekolah Sekolah dan Kampus**

Dari beragam arena perjuangan HTI tak ada yang sestrategis kampus atau perguruan tinggi. Kampus itu paling strategis, karena ia menjadi tempat berkumpulnya anak muda yang terdidik; terbuka pikirannya (*open minded*), egaliter, dan mudah menyerap hal-hal yang baru. Dalam artian dia tidak paternalistik. Berbeda dengan pesantren yang di beberapa tempat sangat paternalistik. Selain itu, kampus berada di perkotaan, pesantren rata-rata di pedesaan. Maka dia (pesantren) lebih lamban menerima transformasi sosial dan menangkap perubahan-perubahan sosial.”

## **Arena Berbasis Komunitas**

### **Komunitas Takmir**

Komunitas ini terdiri dari pengurus-pengurus yang aktif mengelola masjid sesuai dengan bidang masing-masing. Ada yang fokus di bidang ibadah, dakwah, hubungan masyarakat dan lainnya sesuai struktur di kepengurusan takmir yang ada. Upaya HTI dapat terealisasi dengan terbentuknya sebuah komunitas khusus takmir. Upaya tersebut dapat terealisasi dengan terbentuknya sebuah komunitas takmir bernama Forum Takmir Masjid (FTM).

### **Komunitas Dosen dan Komunitas Mahasiswa**

Selain komunitas dosen, komunitas mahasiswa juga mendapat tempat serupa di mata HTI. Mahasiswa adalah kaum muda

terdidik yang berpikiran terbuka sehingga akrab dengan perubahan-perubahan baru. Alasan inilah yang membuat HTI menempatkan komunitas mahasiswa sebagai komunitas paling strategis sejajar dengan komunitas dosen. Proses perjuangan HTI di komunitas mahasiswa diawali kontak personal yang lebih berorientasi pada hubungan pertemanan agar dakwah lebih efektif. Biasanya kontak sering terjadi lewat makan bersama, diskusi informal, menunggu kuliah dimulai dan seterusnya berbuka puasa senen dan kamis bersama. Setelah kontak berlangsung, interaksi intensif pun terjadi.

Selain itu, gerakan mahasiswa pembebasan (Gema Pembebasan) merupakan organisasi bagi anggota HTI yang masih berstatus sebagai manusia. Gema pembebasan secara informal adalah bagian dari HTI. Hal tersebut dapat dilihat dari keanggotaan, kaderisasi serta sikap politiknya. Bahkan hingga saat ini gema pembebasan tidak memiliki AD/ART sendiri. Walaupun demikian kepengurusannya tetap bersifat mandiri serta dipisahkan dari HTI.

### **Majelis Taklim**

#### **Arena Berbasis Lembaga Pemerintahan (Birokrasi)**

Tidak diragukan lagi birokrasi menjadi arena yang sangat strategis bagi HTI dalam perjuangannya. Birokrasi merupakan sarana memperoleh dukungan masif dari titik-titik kekuasaan karena kekuatan inilah yang memegang kendali atas pemerintahan. Lantaran bernilai strategis, HTI mengadakan pendekatan kepada birokrasi di dua level, yakni eksekutif dan legislatif. Di level eksekutif, HTI menggunakan pendekatan formal melalui dengan pemerintah. Pendekatan lain dengan mengundang para tokoh birokrasi untuk menghadiri forum yang digagas HTI guna berdiskusi tentang topik yang dianggap penting. Misalnya, mengorganisir elemen-elemen

seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para tokoh lainnya untuk beraudiensi langsung dengan Gubernur dan Wali Kota terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pornografi. HTI dan beberapa elemen lainnya membentuk sebuah forum bernama "Forum Tokoh Peduli Syariah". Forum ini sengaja dibentuk sebagai wadah khusus untuk berdiskusi dengan para tokoh dan birokrat.

#### **STRATEGI INFILTRASI GERAKAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA**

Pada dasarnya, HTI adalah sebuah gerakan yang memang sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah gerakan sosial, sebab segala pranata yang mengarah pada gerakan sosial sudah dipunyai oleh HTI. Dalam konteks ini, HTI adalah sebuah gerakan yang berani dengan terang-terangan untuk menegakkan sebuah tatanan kehidupan baru, yakni ingin menegakkan syariat Islam dan membentuk khilafah Islam. Padahal, gerakan menegakkan syariat Islam dan membentuk khilafah Islam di mana pun selalu bertentangan dengan ideologi yang ada di setiap negara di mana Hizbut Tahrir berkembang. Karena itu, tidak mengherankan jika kiranya HT (kecuali HTI pasca reformasi) selalu menjadi partai yang bergerak di bawah tanah dan selalu mendapatkan represi dari penguasa.

Setelah memaparkan hal ihwal Hizbut Tahrir termasuk tujuan utamanya dalam menegakkan syariat Islam dalam kerangka Khilafah diantara strategi gerakan Hizbut Tahrir Indonesia untuk mencapai tujuannya tersebut.

#### **Memanfaatkan Peluang Politik (*Political Opportunities*)**

Dalam memanfaatkan peluang politik ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik yang ada di Indonesia. Proses terjadinya peluang atau kesempatan

politik ini diawali dengan: *pertama*, adanya legitimasi terhadap negara yang berkurang sehingga rakyat mampu menyusun gerakan dan juga identitas kolektif. *Kedua*, terdapat erosi dalam tubuh kekuasaan negara itu sendiri sehingga membuat rakyat semakin tidak percaya dan kemudian menggerakkan gerakan moral menentang kekuasaan lewat aksi protes dan demonstrasi. Dan *ketiga*, dari kondisi pertama dan kedua di atas, akan muncul berbagai mobilisasi gerakan sosial yang ikut mendorong dan memperkuat proses ke arah transisi atau perubahan yang diinginkan.

Kondisi inilah yang bisa disebut sebagai peluang politik yang sangat vital dan urgen untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, tidak terkecuali kelompok fundamentalis Islam. Kelompok fundamentalisme Islam ini pun bergerak dan membangun organisasi yang sanggup memobilisasi massa untuk melakukan perubahan secara sistemik. Dalam hal ini, tidak ketinggalan Hizbut Tahrir Indonesia, meskipun pada dasarnya HTI sendiri tidak mau dicap sebagai gerakan fundamentalis.

Setelah sekian lama terkungkung dan berkuat dalam gerakan bawah tanah, HTI pun muncul mengemuka menjadi sebuah organisasi gerakan yang mempunyai *platform* atau ideologi yang sangat jelas dan gamblang serta diekspos secara luas, yakni menegakkan syariat Islam dan membangun khilafah islamiyah. Gerakan bawah tanah sendiri berlangsung mulai dari masuknya HTI ke Indonesia pada tahun 1982 sampai diselenggarakannya *Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah* di senayan Jakarta pada tahun 2000, yakni dua tahun setelah tumbang rezim Orde Baru. Mengenai berlangsungnya tahap *underground* dan pengkaderan serta penguatan massa gerakan HTI ini akan dijelaskan pada langkah memobilisasi struktur atau sumber daya organisasi.

Namun yang pasti, tahap peluang politik ini merupakan tahap penajagan untuk membentuk organisasi yang mampu menancapkan eksistensinya secara lebih kokoh dan terorganisasi. Dan biasanya, tahap peluang politik ini selalu disertai dengan berbagai protes dan demonstrasi menentang segala hal yang menurut anggapan HTI bertentangan dengan ajaran Islam.

Peluang politik Hizbut Tahrir seperti ini, hanya ada di Indonesia karena semua gerakan Hizbut Tahrir di selain Indonesia masih merupakan gerakan bawah tanah, bahkan di negara-negara lain, terutama di Timur Tengah, banyak para akitivis HTI yang disiksa, ditangkap, dan dijebloskan ke dalam penjara.<sup>1</sup>

### **Memobilisasi Struktur (*Mobilizing Structures*)**

Dalam membahas tentang mobilisasi struktur dalam konteks HTI ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari tiga langkah strategis yang dilakukan oleh HTI dalam rangka memobilisasi gerakannya. *Pertama*, langkah pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tastqif*); *kedua*, langkah interaksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'a al-ummah*); dan *ketiga*, langkah pengambilalihan kekuasaan (*istilam al-hukmi*). Yang masuk dalam konteks mobilisasi struktur ini adalah dua langkah pertama, yakni pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tastqif*) dan interaksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'a al-ummah*).

### **Penyusunan Proses Gerakan (*Framing Process*)**

Dalam menyusun proses gerakan ini, HTI melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan segala cita-cita dan perjuangan organisasi, yakni tegaknya syariat Islam dan tegaknya khilafah islamiyah. Dalam konteks ini, ada dua hal yang

1. Hasil bacaan terhadap beberapa majalah HTI "*al-Wa'i*", tentang perjuangan-perjuangan aktivis Hizbut Tahrir di negara-negara lain.

sangat penting untuk dikedepankan, yakni melakukan pergolakan pemikiran (*al-shira' al-fikri*) dan juga perjuangan politik (*al-kifah as-siyasi*).

Di dalam buku, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, dijelaskan bahwa pergolakan pemikiran dilakukan dengan cara menentang berbagai keyakinan, ideologi, aturan, dan pemikiran yang rusak; menolak segala akidah yang batil serta pemikiran yang salah dan sesat dengan mengungkap kesesatan dan pertentangannya dengan Islam; dan membersihkan umat dari segala pengaruh pemikiran dan sistem kufur.

Pergolakan pemikiran dilakukan oleh HTI melalui berbagai sarana seperti media cetak dan elektronik. Media cetak yang dijadikan sarana oleh HTI meliputi penerbitan berbagai buku HTI, majalah bulanan *al-Wa'i*, majalah Khilafah, buletin al-Islam yang terbit mingguan, dan berbagai *leaflet* yang disebarakan kepada masyarakat. HTI juga memanfaatkan media elektronik, yaitu internet dengan membuat berbagai website. HTI termasuk kelompok Islam yang telah memanfaatkan jasa internet secara maksimal dan hal ini bisa terlihat dengan munculnya berbagai situs HTI yang dapat diakses secara terbuka oleh siapa pun.

## **IMPLIKASI SOSIAL - POLITIK INFILTRASI GERAKAN HTI INDONESIA**

Sebuah organisasi Islam ideologis yang mempunyai karakteristik legalistik-formalistik (formalisasi syariat Islam), bersifat doktriner dan militan dalam interaksinya dengan komunitas-komunitas Islam tak mustahil menimbulkan benturan kepentingan bernuansa ideologis maupun politis. Benturan kepentingan HTI, dan ragam komunitas Islam meski tidak dikehendaki kerap berimplikasi pada ranah sosial dan politik. Implikasi sosial atas perjuangan arena kekuasaan

HTI di beberapa wilayah tampak dari adanya persinggungan antara HTI dan komunitas Muhammadiyah. Benturan kepentingan dengan komunitas Muhammadiyah terkait persoalan pemuda, kader masjid, dan penggunaan masjid untuk aktivitas HTI. Kalangan Muhammadiyah tertentu menganggap setiap agenda yang diselenggarakan oleh HTI di masjid yang dikelola pengurus Muhammadiyah seperti diskusi, tabligh akbar, dan orasi ilmiah sebagai upaya merebut atau menguasai masjid dari tangan Muhammadiyah.

Perbedaan pandangan dengan HTI juga menimbulkan masalah sosial bagi di tengah masyarakat. Penerapan syariat Islam menjadi tujuan utama karena ketika syariat Islam telah tegak Khilafah akan mudah berdiri.

Adapun implikasi politik dari perjuangan arena kekuasaan kedua organisasi mengarah pada satu komunitas, yakni PKS. Secara politis keduanya menyatakan bahwa perbedaan konsep dan metode yang dianut PKS menjadikan komitmen dan konsistensi PKS atas perjuangan syariat Islam kerap dipertanyakan. Selain itu implikasi social politik gerakan HTI adalah terkait efektivitas strategi kedua dapat dikatakan bahwa perjuangan arena-arena kekuasaan simbolik HTI pada ranah institusi, komunitas, dan lembaga pemerintahan (birokrasi) cukup berjalan efektif meskipun kerap mengalami kendala. Arena kekuasaan (politik) dianggap sebagai arena dominasi atau paling strategis dalam setiap masyarakat karena bersinggungan langsung dengan hirarki kekuasaan. Terdapat beberapa arena kekuasaan yang efektif dari kedua organisasi. Arena kekuasaan simbolik HTI yang paling dominan terdapat di arena masjid, kampus, lembaga eksekutif dan legislatif. Masjid dianggap strategis lantaran menjadi tempat bertemu dan berkumpul kaum Muslim dari beragam kelas sosial, jenis kelamin, dan

strata sosial lainnya sehingga menjadi arena transformasi ide-ide dan pemikiran HTI, serta menjadi pusat pembinaan dan pengkaderan umat. Dari sini dapat diketahui bahwa faktor kesamaan dan keseragaman *habitus* berupa keyakinan dan ideologi mempercepat transformasi *fiqrah* dan *thariqah* HT. Dengan begitu, pendekatan dakwah politik yang didasarkan keseragaman *habitus* terhadap takmir dan remaja masjid menjadikan perjuangan HTI kian efektif.

Arena kampus sebagai tempat persemaian kaum muda terdidik, *open minded*, dan egaliter menjadi sarana efektif bagi HTI untuk menyebarkan gagasan dan pemikiran tentang Khilafah dan syariat Islam melalui mahasiswa, dosen, dan kaum intelektual berpengaruh lainnya. Tak heran, hampir di setiap kampus menjadi arena perjuangan HTI. Pendekatan terhadap dosen-dosen dan kaum cerdik cendekia lainnya tampak dari kontribusi kaum intelektual. dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh HTI baik di kampus maupun di luar kampus. Dukungan intelektual yang berpengaruh menandai bahwa mobilisasi kader HTI mampu mengkonstruksi kekuatan-kekuatan yang menjelma menjadi modal budaya yang efektif dan strategis guna menentukan jenjang hirarki dalam masyarakat. Di lembaga eksekutif dan legislatif HTI mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan sistem pemerintahan Islam. Kritik dilontarkan melalui surat resmi, audiensi, dan terkadang mengundang perwakilan keduanya untuk berdiskusi khususnya tentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang pada Oktober 2008 telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) Pornografi. Hal efektif lainnya, pada awal 2008 HTI membentuk Forum Tokoh Peduli Syariah yang dijadikan sebagai wadah khusus untuk berdiskusi dengan para tokoh dan birokrat

terkait berbagai persoalan bersama elemen-elemen lain seperti MUI. Upaya HTI melakukan interaksi dan komunikasi dengan kedua lembaga pemerintahan daerah tersebut menunjukkan kepemilikannya atas modal sosial yang bertujuan melanggengkan hubungan-hubungan sosial yang dekat dengan hirarki kekuasaan.

## PENUTUP

Kemunculan organisasi Islam ideologis seperti HTI dalam kancah perpolitikan Indonesia khususnya politik Islam di awal reformasi sampai saat ini merupakan bentuk kekecawaan mereka terhadap rezim-rezim sebelumnya. Dalam konteks ini HTI merasa terpenggil dan berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan kekuasaan Islam politik dengan memformulasikan arah perjuangannya lewat jalur organisasi politik Islam ideologis dengan menggusung penerapan syari'at Islam mewujudkan ide khilafah Islamiyah.

Strategi yang digunakan HTI dalam melakukan mewujudkan gagasan penerapan syari'at Islam dan khilafah dengan cara menguasai arena-arena strategis yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini HTI melakukan strategi infiltrasi gerakan HTI dengan memanfaatkan peluang politik (*political opportunities*), memobilisasi struktur (*mobilizing structures*), dan melakukan penyusunan proses gerakan (*framing process*). Ketiga kerangka strategis itulah yang menjadi bagian dari metode atau strategi HTI dalam menegakkan syariat Islam dalam bingkai khilafah islamiyah.

Selain itu, HTI juga berusaha memperebutkan kekuasaan simbolik melalui penguasaan arena-arena yang tersebar di berbagai tempat: institusi, komunitas, dan lembaga pemerintahan (birokrasi) dengan pola-pola pendekatan yang khas. Arena-

arena perjuangan tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut. Pertama, arena perjuangan HTI meliputi: satu, arena berbasis institusi berupa masjid kampus dan non-kampus, sekolah-sekolah umum dan Islam dari TK sampai SMA, kampus-kampus umum dan Islam yang tersebar. Dua, arena berbasis komunitas terdiri dari komunitas takmir masjid, dosen, mahasiswa, majelis taklim, posyandu, buruh, dan tahlilan. Tiga, arena berbasis lembaga pemerintahan daerah seperti eksekutif dan legislatif.

Arena-arena di atas jika menggunakan perspektif Pierre Bourdieu sebagai *tool of analysis*, maka dapat dipetakan berdasarkan konsep *habitus*, arena perjuangan (*champ*) dan *capital* yang pada akhirnya akan membentuk kekuasaan simbolik. []

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, Muhammad Iqbal, MMI dan HTI; the image of the others. Dalam A.Maftuh Abegebriel "Negara Tuhan The Thematic Encyclopedia". Yogyakarta: SR-Ins Publishing. 2004
- An-Nabhahi, Taqiyuddin, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Jakarta: HTI Press. 2007
- \_\_\_\_\_, *Pembentukan Partai Politik Islam*. Jakarta: HTI Press, 2007
- \_\_\_\_\_, *Mafahim Hizbut Tahrir*, diterjemahkan oleh Abdullah, cet. ke. 6, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001.
- \_\_\_\_\_, Taqiyuddin *Peraturan Hidup dalam Islam*, diterjemahkan oleh Abu Amin dkk., cet. ke-3, Bogor: Hizbut Tahrir, 2003.
- \_\_\_\_\_, Taqiyuddin *Sistem Pemerintahan Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Magfur wachid, cet. ke-1, Bangil, al-Izzah, 1996.
- \_\_\_\_\_, Taqiyuddin, *Pembentukan Partai Politik Islam*, diterjemahkan oleh Labib, Zakaria dkk., cet. ke-2, Tt.: Hizbut Tahrir, 2002.
- Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995
- Al-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj., Ahmad Suaedy, Yogyakarta : LkiS, 2001.
- Arifin, Syamsul, *Islam Indonesia*, Surakarta : Umpress, 2003.
- Assyaukanie, Luthfi, *Ideologi Islam dan Utopia*, Jakarta: Freedom Institute, 2011
- Abdallah, Ulil Absar, *Islam Liberal dan Fundamental*, Yogyakarta : Elsaq Press, 2003.
- Ra'is, Muhammad Diya'uddin, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, terj, Alwi Jakarta : PT Lentera, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Khilafah Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam Ali Abdur Raziq*, Bandung : Pustaka, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Islam & Politik Bernegara*, disadur Hasbi Ash-shiddiqiey, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqra', 2001.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1996.
- Azzam, Salim, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*. terj, Malikul Huda. Bandung : Mizan 1983.
- Al-Maududi, Abul A'la, terj., Asep Hikmat, *Sistem Politik Islam*. Bandung : Mizan, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung : Mizan, 1984.
- Burrel. RM, *Fundamentalisme Islam*, terj, Yudian Wahyudi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia, 2000
- Burhanuddin (ed) *Syari'ah Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta : JIL, 2003.
- Brown, I. Carl. *Wajah Islam Politik Pergulatan Agama & Negara Sepanjang Sejarah Umat*. terj, Abdullah Ali. Jakarta : Serambi, 2003.
- Dengel, Holk H, *Darul Islam Dan Kartosuwiryo Angan-angan yang Gagal* Jakarta : Sinar Harapan, 1995.
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998
- Fashri, Fauzi, *Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Juxtapose, 2007
- Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya : Bina Ilmu, 1984.
- Hizbut Tahrir Indonesia *Menjaga Kesatuan Negeri-negeri Islam*
- \_\_\_\_\_, *Al-islam blutin mingguan*
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia*
- \_\_\_\_\_, *Bagaimana membangun kembali negara khilafah* Bogor : Toriqul Izzah, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Strategi dakwah Hizbut Tahrir* Bogor : Pustaka Toriqul Izzah, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Al-wa'ie* No. 45 tahun IV 1-3 Mei 2004.
- \_\_\_\_\_, *Al-wa'ie*. Edisi khusus Maret 2006.
- \_\_\_\_\_, *Mengkritisi Kapitalisme Pendidikan*, Balai Utari Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta 2005.
- \_\_\_\_\_, *Saatnya Khilafah Memimpin Dunia, Hapus Penjajahan dari Indonesia*. Yogyakarta : Kagama UGM 26 Maret 2006.
- \_\_\_\_\_, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan & Administrasi)* Jakarta : HTI Press, 2006.
- Jainuri, Ahmad, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam*, Surabaya : LPAM, 2004.
- Harker, Richard dkk (ed), *Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007
- Haryatmoko, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa*. Majalah Basis nomor 11-12. tahun ke-52, November-Desember 2003.
- \_\_\_\_\_, (2008). *Sekolah, Alat Reproduksi Kesenjangan Sosial Analisis Kritis pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Majalah Basis Nomor 07 – 08, Tahun ke-57, Juli – Agustus 2008.
- Jenkins, Richard, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004
- Fashri, Fauzi, *Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Juxtapose, 2007
- Latif, Yudi, *Inteligensia Muslim dan Kuasa Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan, 2005
- Majelis Mujahidin Indonesia, *Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina* Yogyakarta: Wihdah Press, 2004
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta : LP3ES, 2006.
- Nashir, Haedar, (2007). *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: PSAP.
- \_\_\_\_\_, *Manifesto Gerakan Terbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007

- Panggabean, Samsu Rizal dan Amal, Taufik Adnan, *Politik Syariat Islam Dari Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 2004
- Raziq, Ali Abdur, *Islam Dasar-dasar Pemerintahan*, terjm. M. Zaid Su'di, Yogyakarta : Jendela, 2002.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UIP, 1993.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Mengkritisi Debat Fikih Lintas Agama*, Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2004.
- Wamy, edisi Indonesia berjudul *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran Akar Ideologis dan Penyebarannya* terj, Abu Ridha Jakarta : al-I'tisam, 2003.
- Yusanto, Muhammad Ismail, *Keragaman Kelompok Islam: Studi Komparatif Hizbut Tahrir Indonesia dengan Kelompok Lain*, <http://hizbut-tahrir.or.id/main/php?page=jubir&id=29>.
- KH. Wahid Abdurrahman (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009
- Zada, Khamami *Islam Radikal Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* Jakarta : Teraju, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Diskursus Politik Islam*, LSIP (Lembaga Studi Islam Progresif), 2004
- [www.HizubtTahriri.Or.id](http://www.HizubtTahriri.Or.id)
- [www.Khilafah1924.com](http://www.Khilafah1924.com)
- [www.my.khilafah.com](http://www.my.khilafah.com)